

Perpolitikan Indonesia Pasca Pilpres dan Relevansi Teori Politik Al-Ghazali

Mawar Febrianti

Mahasiswi Magister Ilmu Agama Islam Universitas Paramadina, Jakarta.
mawarfebrianti@gmail.com

Abstract: *Indonesia experienced a great political upheaval after the implementation of the April 14 2019 presidential election yesterday. Such a situation is the culmination of a feeling of dissatisfaction from the part of the Indonesian people towards the government that has been going on so far and for the implementation of the 2019 presidential election which is considered incompatible with the presidential election's honesty (honest and fair). For this reason, Indonesia, in this case the government and the people, must immediately rise up, and control the condition of Indonesian politics to immediately return to conducive conditions. Al-Ghazali's political theory emphasizes the importance of choosing leaders who have good aqeedah and adab, are intelligent, master the knowledge of religion and government, are fair, understand the difficulties of the people, are close to the people. The leader must also be close and willing to listen to the advice of the scholars (religious leaders, national figures and intellectuals), not accepting bribes or bribing and not corruption. The implications of al-Ghazali's theory are very possible and quite relevant to be implemented in Indonesia, but of course it must be adapted to the system of government, culture and society in Indonesia.*

Keywords: *Al-Ghazali, Islam, pilpres, politik, agama, ulama.*

Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Sistem perpolitikan di Indonesia saat ini kian mengalami carut marut. Karena itu, politik di Indonesia harus segera bangkit dari keterpurukan. Kebangkitan politik yang dicetuskan oleh para bapak atau tokoh-tokoh bangsa (the founding fathers) dalam rangka perjuangan kemerdekaan Indonesia yakni oleh Soetomo, Ir Soekarno, Dr. Tjipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantoro dan dr. Douwes Dekker harus selalu diimplementasikan dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia saat ini.

Selain permasalahan korupsi, jual beli jabatan, suap menyuap yang semakin kronis, sekarang bertambah lagi permasalahan-permasalahan baru yang muncul, terutama setelah pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan anggota legislatif pada tanggal

14 April 2019 kemaren. Rakyat Indonesia seakan terbelah, dua kubu dari dua calon yang diusung pada pilpres kemaren saling menghujat, saling menuduh dan saling klaim atas kemenangan calon pilihan mereka. Meskipun KPU telah mengumumkan hasil perhitungan suara pada malam tanggal 21 Mei 2019. Namun ternyata tidak menyurutkan gejolak politik yang terjadi di Indonesia. Dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif yang diperkirakan telah terjadi sejak awal kampanye hingga perhitungan suara, membuat kubu 02 sebagai pihak yang kalah akhirnya mengajukan penolakan, dengan mengajukan gugatan keberatan terhadap Mahkamah Konstitusi. Mereka mengklaim pemilu sekarang jauh dari semboyan pemilu yang jujur dan adil.

Dampak dari ketidakpuasan terhadap hasil keputusan KPU, membuat perpolitikan di

Indonesia semakin memprihatinkan. Sebagian masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah, menimbulkan gelombang penolakan rakyat, demonstrasi terjadi dimana-mana, nilai tukar rupiah ambruk, roda perekonomian menjadi terhambat dan korbanpun bertambah. Pemilu serentak dan pertama kali dilaksanakan di Indonesia, yang digadang-gadang sangat sukses dan berjalan lancar oleh pelaksana pemilu dan pemerintah, tidak dapat dipungkiri telah menyisakan kesedihan bagi keluarga yang menderita sakit, meninggal bahkan hilang dan sampai saat ini belum diketahui keberadaannya, baik dari petugas KPPS maupun saat demonstrasi 21-22 Mei 2019 kemaren.

Pada tanggal 27 Juni 2019 tepatnya pukul 21.15 WIB keputusan hasil sidang pun dibacakan, dan paslon 01 Jokowi-Ma'ruf tetap dinyatakan menang karena seluruh gugatan yang diajukan kubu 02 ditolak oleh MK, dengan dalih seluruh bukti yang diajukan tidak menunjukkan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif. Keputusan MK tersebut tentunya menimbulkan kekecewaan yang mendalam bagi Prabowo-Sandi dan pendukungnya, karena mereka merasa semua usaha untuk menuntut keadilan adalah sia-sia, MK sebagai langkah perjuangan terakhir dianggap benar-benar hanya berperan sebagai Mahkamah Kalkulator yang membuat keputusan hanya berdasarkan data kuantitatif dan mengabaikan semua data kualitatif.

Dalam sejarah Islam, politik merupakan hal yang tidak asing dalam kehidupan masyarakat muslim, Nabi Muhammad SAW adalah juga seorang pemimpin, panglima perang sekaligus politikus yang handal. Hal ini ditandai dengan diterimanya agama Islam di tanah Arab yang semula merupakan pusat agama Majusi, Nashrani dan penyembah berhala, hingga sekarang menyebar hampir ke seluruh pelosok bumi. Dalam al-Qur'an ayat-ayat yang berbicara tentang aturan kekuasaan dan kepemimpinan yang sangat identik dengan perpolitikan juga banyak ditemukan. Diantaranya dalam QS. An Nisa':58

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha melihat."

Ayat tersebut mengandung makna, jika seseorang menjadi pemimpin hendaklah berlaku adil baik dalam pemberian hak maupun dalam pelaksanaan hukum. Selain itu hadist Rosulullah SAW juga banyak yang berbicara tentang politik dan kepemimpinan di antaranya, HR. Bukhori dan Ahmad:

"Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda : Bila amanat telah disia-siakan, maka tunggulah saat kehancurannya (atau sebagai pertanda dekatnya hari kiamat), sahabat bertanya, bagaimana amanat itu disia-siakan ya Rosulullah? Beliau menjawab, bila satu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya."

Kedua dalil naqli di atas menunjukkan bahwa bahwa Islam tidak bisa dipisahkan dari politik dan kepemimpinan. Selain sosok Nabi Muhammad SAW, tokoh-tokoh Islam lain juga konsisten berbicara bahkan terjun langsung ke dunia politik, karena mereka menyadari bahwa kebangkitan Islam tidak terlepas dari perpolitikan. Di antara para tokoh yang menaruh perhatian terhadap politik dan kebangkitan Islam adalah Muhammad Al- Ghazali.

Latar belakang Perpolitikan al-Ghazali

Nama lengkap Imam al-Ghazali adalah Abu Hamid bin Muhammad bin Ahmad al

Ghazali ath-Thusi, lahir di Khurasan (Iran) pada tahun 450 H / 1058 M dan meninggal di Thus pada tanggal 18 Desember 1111 M / 14 Jumadil Akhir 505 H dalam usia 55 tahun. Ayahnya adalah seorang pemintal benang yang shaleh, yang meninggal dunia ketika Imam al-Ghazali dan saudaranya Ahmad masih kecil. al-Ghazali adalah tokoh yang sangat besar, pemikiran dan keilmuannya dalam banyak bidang ilmu nyaris sempurna, salah satu karyanya yang luar biasa dan sangat terkenal adalah Ihyā'Ulum al-Dīn, karya besarnya yang banyak membahas tentang banyak hal termasuk di dalamnya tentang politik dan kepemimpinan. Ataupun dalam karyanya al-Tibr al-Masbuk fi Nashihat al Muluk yang berisi tentang nasihat-nasihat politik yang dihadiahkan kepada Sultan Muhammad Ibnu Malik dari dinasti Saljuk, al-Iqtishad fi al-'ikhtiqad dan Fadhaih al-Bathiniyah.

Perhatian al-Ghazali terhadap politik di mulai karena melihat perkembangan Islam harus diawali dari kebangkitan umat Islam dalam perubahan melalui pembaruan dan revolusi.⁶ Saat itu al- Ghazali berprofesi sebagai seorang dosen, sekaligus guru besar pada perguruan Nidzamiyah milik dari Nizam al-Mulk. Dan Baghdad di bawah kekuasaan Dinasti Saljuk. Kepedulian sultan Saljuk terhadap ilmu memberi angin segar bagi masa depan perpolitikan Nizam al-Mulk. Berapa kerajaan lain bergabung diantaranya kerajaan Gasnawi di India dan kerajaan Sudan. Pengaruh Syiah merosot tajam hingga sampai ke Mesir, dan menyebabkan Dinasti Fatimiyah menuju keruntuhan. Masa ini merupakan kejayaan Sunni dan kemerosotan Syiah. Sementara di selatan saat itu kerajaan Ismaili di Yaman yang berkuasa sejak tahun 438-569 H di bawah pimpinan Bani Sulaihi juga mulai mengalami kemunduran.

Namun dibalik kemunduran Syiah tersebut, sebenarnya gerakan politik Syiah tidak pernah mati, ketika kerajaan-kerajaan Syiah mulai menyusut, militan-militan Syiah Bathiniyah bergerak di bawah tanah. Pada tahun 1902 secara mengejutkan di bawah pimpinan Hasan Ibn al- Sabah mereka membantai Nizam al-Mulk.

Pasca wafatnya Nizam al-Mulk, kebesaran Abbasiyah mulai turun, yang berdampak buruk pada perpolitikan dan keilmuan di Irak. budaya korupsi oleh para pejabat kembali marak, munculnya ulama su'u (jahat) dan pertikaian antar kelompok sempalan. Hal ini menjadi tantangan besar bagi al-Ghazali yang saat itu ia merupakan seorang ulama sekaligus akademisi untuk kembali memperbaiki pemahaman ilmu masyarakat dan memiliki kewajiban politik untuk mengingatkan pejabat, sebagaimana telah dilakukannya pada pejabat-pejabat masa Dinasti Saljuk.

Pengalaman-pengalaman dalam situasi sosial politik tersebut ditambah corak keilmuan al-Ghazali telah membentuk pemikirannya tentang politik. Teori politiknya didominasi tentang bagaimana menjalankan sistem kenegaraan yang mempertimbangkan moralitas untuk kemashlahatan bersama, dengan pemimpin yang memiliki integritas tinggi ditopang dengan kekuatan moral memenuhi kriteria sebagai pemimpin yang diidamkan.⁹ Pemikiran politik al Ghazali tersebut menurut penulis masih sangat relevan diterapkan di Indonesia saat ini.

Landasan Teori tentang Politik

Secara etimologi politik berasal dari kata politikos (Yunani) yang berarti dari, untuk (yang berkaitan dengan warga negara), politiek (Belanda), siyasah (Arab), dan politics (Inggris).

Sedangkan pengertian politik menurut para ahli adalah:

- a. Menurut Aristoteles, politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama.
- b. Menurut Kartini Kartolo, politik adalah aktivitas prilaku atau proses yang menggunakan

kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan atau keputusan-keputusan yang sah yang berlaku di masyarakat.¹²

- c. Menurut KKBI, 1. politik adalah pengetahuan ketatanegaraan atau kenegaraan (sistem dan dasar pemerintahan). 2. Segala urusan dan tindakan negara terhadap negara lain. 3. Cara menghadapi segala permasalahan negara

Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli tersebut, secara umum pengertian politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang diantaranya berwujud proses pembuatan dan keputusan negara.

Gejolak Perpolitikan Indonesia Pasca Pilpres 2019

Perpolitikan di Indonesia semakin bergejolak dimulai sejak pendaftaran calon pemilihan presiden dilakukan, diawali dengan penetapan DPT yang disinyalir tidak sesuai dengan DPT sesungguhnya, terdapat sekitar 17 juta suara DPT bermasalah seperti KTP ganda, dan pemilih fiktif. Pada masa kampanye keterlibatan dan netralitas ASN dan BUMN juga menjadi permasalahan yang serius, pengerahan kepala daerah dan BUMN terhadap salah satu pasangan calon, semakin menegaskan akan ketidaknetralan penguasa. Sayangnya tindakan dari Bawaslu dan kepolisian tidak sama, ada yang hanya berupa teguran saja, namun dipihak lain ada yang sampai dipenjara

Ketika masa pencoblosan, walaupun dinyatakan berjalan lancar tetap menyisakan cerita tentang adanya ketidakjujuran, seperti kasus surat suara yang telah tercoblos, terbakar ataupun yang hilang. Sehingga di beberapa tempat dilakukan pemilihan ulang. Ditambah lagi duka akibat kematian petugas KPPS yang hampir menyentuh angka 600 orang, yang sampai saat ini belum bisa dipastikan apakah penyebabnya, para Dokter ada yang menyimpulkan karena faktor kelelahan dan riwayat penyakit petugas tersebut, namun tidak sedikit ahli medis menyatakan bahwa faktor kelelahan tidak mungkin dapat menyebabkan kematian masal.

Setelah pencoblosan, ketika mulai proses perhitungan suara kesalahan situng KPU yang tayang setiap hari mencapai total 73.715 ribu lebih kesalahan atau 15.4 persen dari total 477.021 TPS, dan disinyalir banyak merugikan pasangan 02.16 Membuat KPU dihujani hujatan, ditambah lagi proses pengumuman yang mendadak dilakukan diluar jadwal dan tengah malam di saat perhitungan suara belum mencapai 100 persen selesai, menambah meradang kubu 02. Hingga puncak dari semua itu terjadilah demonstrasi yang memicu terjadinya kerusuhan yang dimanfaatkan oleh sekelompok orang-orang yang menginginkan Indonesia semakin kacau dan membuat keadaan semakin tidak kondusif pada tanggal 21-22 Mei 2019,

CNN Indonesia, "Haris Azhar Sebut ada 5 Jenis Dugaan Netralitas ASN pada Pemilu 2019," <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190508202028-32-393192/haris-azhar-sebut-ada-5-jenis-dugaan-pelanggaran-pemilu-2019>, diakses pada 12 Juni 2019, pukul 13.00 WIB

BBC News, "Lebih 550 Petugas Pemilu Meninggal: Penyakit Bawaan, Politisasi," <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48226348>, diakses pada 18 Juni 2019, pukul 05.21 WIB yang memakan banyak korban dirawat dan 9 meninggal dunia.

Kejadian-kejadian diatas membuat perpolitikan Indonesia begitu memprihatinkan, ditambah lagi dengan pemberlakuan beberapa pasal-pasal karet dengan dalih mengontrol ucapan-ucapan para tokoh-tokoh bangsa dan ulama. Mereka yang berteriak lantang tentang ketidakadilan dan ketidakjujuran dikenakan pasal makar yang diatur KUHP pasal 104, 107

dan 108, menyebar hoaks pasal 28 ayat 1 dan Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3.18. Sungguh demokrasi dan hak bersuara di Indonesia diambang kehancuran.

Hingga saat menjelang keputusan Mahkamah Konstitusi dibacakan pada tanggal 27 Juni 2019, sekitar kurang lebih 2.500 masyarakat yang berharap keadilan, dan menamakan aksi mereka sebagai aksi kawal MK berkumpul di sekitar Patung Kuda yang letaknya tidak jauh dari gedung MK.19 Tepat pukul 21.15 WIB MK membacakan keputusannya dengan menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh kubu 02. Permohonan yang ditolak tersebut antara lain:

1. Menolak dalil aparat tidak netral versi kubu Prabowo-Sandi
2. Menolak tuduhan Jokowi money politics
3. Menyatakan kubu Prabowo-Sandi gagal membuktikan ajakan pakai baju putih ke TPS bagian intimidasi
4. Menolak tuduhan kedekatan ketua BIN Budi Gunawan dan ketua umum PDIP Megawati sebagai upaya keberpihakan BIN terhadap Jokowi- Ma'ruf.
5. Menolak bukti suara Prabowo-Sandi nol di 5.268 TPS20

Dengan adanya penolakan dari MK tersebut, maka Jokowi-Ma'ruf dinyatakan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024, sesuai dengan yang telah diputuskan KPU sebelumnya.

Menurut penulis, tugas utama Jokowi-Ma'ruf sebagai Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih adalah menyatukan kembali rakyat Indonesia yang terbelah karena pilpres, mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk kembali bersatu dan keluar dari keterpurukan bangsa saat ini, ketegangan- ketegangan politik saat ini harus bisa diatasi. Pemerintah harus mulai mencari apa penyebab dari semua ketegangan yang terjadi saat ini, rakyat harus segera kembali bersatu, penguasa harus mulai mendengarkan suara rakyat yang pro pemerintah maupun oposisi. Penegakan hukum harus dilaksanakan dengan seadil-adilnya, karena ketidakadilan adalah akar dari perpecahan dan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah. Pemerintah juga harus melibatkan para tokoh-tokoh bangsa, intelektual, akademisi dan tokoh-tokoh agama dari berbagai aliran dan agama, karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religius dan ketika rakyat telah kehilangan kepercayaan kepada penguasa, maka ulama adalah orang pertama yang akan rakyat cari dan dengarkan. Tidak melibatkan apalagi memusuhi ulama dan tokoh-tokoh bangsa yang berseberangan, justru akan menambah kebencian sebagian masyarakat terhadap pemerintah. Jika kebencian tersebut dibiarkan berkelanjutan maka akan mengganggu roda pemerintahan, perpolitikan, perekonomian dan kemajuan bangsa.

Teori Politik al-Ghazali

Kitab al-Tibr al Masbuk fi Nashihat al Muluk adalah karya utama al-Ghazali tentang politik, yang berisi tentang nasihat –nasihat untuk penguasa, yang dihadiahkan kepada Sultan Muhammad Ibnu Malik dari Dinasti Saljuk. Menurut al-Ghazali seorang khalifah (pemimpin) adalah pelindung pelaksanaan syariat (hukum). Pelaksanaan hukum merupakan tanggung jawab penguasa. Maka menurutnya keberadaan negara sangat urgen. Dalam hal ini pemikirannya tidak jauh berbeda dengan pemikiran Ibnu Taimiyah. “keteraturan agama tidak bisa dihasilkan kecuali dengan seorang imam (pemimpin negara) yang ditaati” karena itu menurut al- Ghazali seorang pemimpin beserta perangkat-perangkat politiknya harus menjalankan tugas sesuai dengan adab berpolitik. Jika seorang pemimpin yang menjaga adab berpolitik, maka politik menjadi tugas mulia. Jika penguasa dan pejabat negara zalim, maka harus dijauhi.

Al-Ghazali menekankan bahwa lancarnya roda pemerintahan suatu Negara sangat bergantung pada pemimpin, karena itu menurut al-Ghazali ada beberapa kriteria yang harus dimiliki seorang pemimpin diantaranya,

Pemimpin harus memiliki keimanan yang benar, aqidah yang kuat dan seorang pemimpin juga hendaknya tetap menyadari bahwa kekuasaan tertinggi adalah al-Khalik (Allah SWT). Dalam hal ini juga al-Ghazali secara implisit memberi peringatan bahwa kekuasaan hanya titipan Allah SWT. Allah memberi amanah untuk menstabilkan negeri dan memakmurkan rakyat sesuai dengan syariatNya. Dalam sub-sub babnya, al-Ghazali menulis tentang keEsaanNya, tiada satupun yang menyamaiNya, sifat-sifat Allah, mengingatkan akhirat dan tugas Nabi Muhammad SAW.

Pemimpin harus cerdas, seorang pemimpin harus memiliki ilmu pengetahuan yang banyak, bukan orang yang bodoh apalagi tidak waras. Bagi al-Ghazali “ilmu dan akal tetap merupakan nilai-nilai agama yang adiluhung dan jalan menuju Tuhan”²⁴ mengetahui adalah amal tertinggi. Melalui kecerdasannya manusia mampu menjadi khalifah pilihan Tuhan, dan pemimpin di muka bumi. Dan pengetahuan sejati adalah pengetahuan yang diamalkan.

Pemimpin harus adil, menurut al-Ghazali keadilan adalah pertemuan antara kepentingan-kepentingan agama dan duniawi. Keadilan adalah “memper- lakukan orang lain dengan cara mengibaratkan engkau adalah rakyat memperlakukan sultan, engkau berfikir seharusnya begitulah engkau memperlakukan rakyat”.²⁶ Pengadilan syariat yang dijalankan oleh para kadi (hakim) merupakan bagian mutlak diperlukan dalam suatu tatanan masyarakat. Sehingga terjalin hubungan harmonis antara penguasa dan rakyat. Berbicara tentang kadi, Nizam berkata: “pada setiap masa... dalam setiap transaksi... manusia menjunjung tinggi kesetaraan dan persamaan : karena menetapi keadilan...dan masyarakat sekitar menetapi keadilan...dan masyarakat sekitar merasakannya. Keadilan kunci bertahannya dinasti (pemerintahan)

Pemimpin harus memiliki sifat-sifat yang baik, tidak zalim dan juga tidak takabur, menurut al- Ghazali, biasanya setiap pemimpin pasti dicoba dengan sifat takabur. Takabur seorang pemimpin adalah penyakit hati yang sangat berbahaya, karena akan mendorong rasa permusuhan dan dapat berakhir pada pertumpahan darah. Seorang pemimpin harus memahami kesulitan rakyatnya, berdekatan dengan rakyat, dan melepas baju kesombongan. Al- Ghazali juga menegaskan bahwa seorang penguasa jangan sekali-kali menerima suap dari rakyatnya, dan melakukan suap atau korupsi

Secara garis besar, nasihat-nasihat al-Ghazali tentang kriteria seorang pemimpin lebih menekankan pada kebaikan aqidah dan kebaikan adab. Ilmu dan adab yang ditekankan al-Ghazali dalam perbaikan politik adalah model perbaikan integratif. Seorang pemimpin dan pejabat negara tidak saja menguasai terot-teori politik akan tetapi mereka juga harus faqih (menguasai ilmu-ilmu agama). Pelaksana syariah (penegak hukum) dalam hal ini pemerintah, sangat membutuhkan penopang yaitu legitimasi agama. Dan agama meliputi aspek sosial, ekonomi, politik dan budaya termasuk aspek moral dan spiritual kehidupan. Sehingga dengan demikian agama dipandang sangat penting, agama adalah poros, dan penguasa adalah penjaga, dan sesuatu yang tidak ada penjaganya akan hancur.³⁰ Untuk itulah antara agama dan negara (kekuasaan) tidak bisa dipisahkan.

Kedudukan Ulama dalam Pemerintahan

Al-Ghazali berpendapat bahwa kedudukan ulama sangat penting, seorang pemimpin harus selalu berusaha mendekati ulama yang baik, menjadikan ulama sebagai penasihat. Al-Ghazali mengatakan bahwa kerusakan ulama akan merusak penguasa, dan kerusakan

penguasa pada gilirannya akan merusak rakyat.³¹ Karena itu ulama su'u (jahat) yang mendekati penguasa dengan tujuan untuk meminta jabatan, dan merauf keuntungan pribadi harus dihindari.

Al-Ghazali mengatakan, bahwa kesucian legal formal atau lahiriyah menutupi kekotoran intrinsik. Yang kelihatan suci di luarnya, tidaklah suci di dalamnya (politik pencitraan). Yang diharamkan menjadi dihalalkan, dan yang dihalalkan menjadi diharamkan.³² Hadiah penguasa terhadap ulama dan fungsionaris adalah cara yang diharamkan dalam Islam.³³ Al-Ghazali berpendapat bahwa ulama dan penguasa merupakan dua kekuatan yang melanggengkan keadaan rakyat yang menyedihkan.

Implikasi Teori al-Ghazali dalam Perpolitikan Indonesia

Kondisi perpolitikan di Indonesia sekarang, yang sedang mengalami kekacauan dan kemunduran dalam demokrasi. Menurut penulis harus segera diadakan evaluasi dan perbaikan. Indonesia bisa belajar dari negara- negara yang pernah jatuh namun bisa bangkit dari keterpurukan. Para pemimpin dan penguasa bisa mempraktekkan teori-teori politik dari para tokoh-tokoh yang menguasai tentang perpolitikan. Pertanyaannya apakah teori politik al-Ghazali bisa dan relevan diterapkan dalam perpolitikan Indonesia?

Menurut penulis, sangat mungkin dan masih sangat relevan teori al-Ghazali diimplementasikan di Indonesia. Tidak perlu diragukan kejayaan Dinasti Saljuk, yang tidak bisa dipisahkan dari peran besar al-Ghazali di masa itu. Kekuasaan Saljuk mengalami puncak kejayaan ketika dipimpin oleh Sultan Nizam al-Mulk, yang saat itu bersahabat dekat dengan al-Ghazali dan menjadikan al- Ghazali sebagai penasihat pribadinya.

Pemerintahan Indonesia saat ini sedang mengalami krisis kepercayaan (distrust) sebagian masyarakat Indonesia. Analisa penulis berdasarkan teori al-Ghazali, adalah merupakan dampak dari rasa ketidakadilan dan ketidakjujuran pemerintah yang dirasakan masyarakat. Ketidakpuasan masyarakat dalam pemberlakuan hukum dan aktualisasi janji-janji yang dirasa jauh dari yang diharapkan. Sebagian masyarakat merasa dibohongi akibat politik pencitraan yang pernah dilakukan penguasa. Sebenarnya pro dan kontra dalam suatu kepemimpinan menurut penulis adalah wajar, bahkan kritik-kritik mereka yang kontra (oposisi) sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan kemajuan bangsa. Untuk itu sikap antipati terhadap oposisi yang berseberangan, sesungguhnya justru sangat merugikan pemerintahan yang sekarang sedang berlangsung di Indonesia.

Bila al-Ghazali berpendapat bahwa pemimpin harus merangkul ulama. penulis berpendapat bahwa pengertian ulama, bila dikaitkan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang terdiri dari multi agama, ras dan suku. Kata ulama mengandung makna orang-orang yang ahli dan berilmu, dan mereka adalah para kyai, ustadz, pastur, pendeta, rahib dan termasuk di dalamnya para tokoh bangsa, intelektual dan para akademisi. Maka pemerintah harus merangkul mereka, melibatkan mereka dengan meminta pendapat dan ide mereka dalam menentukan suatu kebijakan, terutama kebijakan publik yang pelaksanaannya melibatkan masyarakat dan dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat.

Siapa pun pemimpinnya, tentu semua berharap Indonesia menjadi negara yang maju, berdaulat, rakyat merasa aman, adil dan makmur. Rakyat sangat mencintai pemimpinnya karena pemimpin yang terpilih sesuai dengan pilihan dan keinginan sebagian besar masyarakat Indonesia.

Penutup

Indonesia mengalami pergolakan politik yang hebat setelah pelaksanaan pilpres 14 April 2019 kemaren. Keadaan demikian merupakan puncak dari rasa ketidakpuasan sebagian rakyat Indonesia terhadap pemerintahan yang telah berlangsung selama ini dan atas pelaksanaan pilpres 2019 yang dianggap tidak sesuai dengan semboyan pilpres yang jurdil (jujur dan adil). Untuk itu Indonesia, dalam hal ini pemerintah dan rakyat, harus segera bangkit, dan mengendalikan kondisi perpolitikan Indonesia agar segera kembali kondusif.

Teori politik al-Ghazali menekankan pentingnya memilih pemimpin yang memiliki aqidah dan adab yang baik, cerdas, menguasai ilmu agama dan pemerintahan, adil, memahami kesulitan rakyat, dekat dengan rakyat. Pemimpin juga harus dekat dan mau mendengarkan nasihat para ulama (tokoh agama, tokoh bangsa dan intelektual), tidak menerima suap atau menyuap dan tidak korupsi.

Implikasi teori al-Ghazali sangat memungkinkan dan cukup relevan untuk dilaksanakan di Indonesia, namun tentunya harus disesuaikan dengan sistem pemerintahan, budaya dan masyarakat di Indonesia.

Bibliografi:

- Abu Hamid al-Ghazali, *al-Iqtishad fi al-I'tiqod* (Beirut: dar el-Qutaibah, 2003), cet-1.
- Abu Hamid al-Ghazali, *al-Tibr al-Masbuk fi Nashihat al-Mulk* (Beirut: Dar el Kutubal-Ilmiyah, tth). Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin* (Beirut: Dar el Kutubal-Ilmiyah, tth), JUZ.2, H.151
- Ali Rahnema, *Para Perintis Zaman Baru Islam*, terj. Ilyas Hasan (Bandung: Mizan, 1994).
- Antony Black, *Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: PT. Serambi Alam Semesta, 2006), h. 193
- BBC News, "Lebih 550 Petugas Pemilu Meninggal: Penyakit Bawaan, Politisasi," <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48226348>, diakses pada 18 Juni 2019, pukul 05.21 WIB
- Busthami M. Said, *Pembaharu dan Pembaharuan dalam Islam* (Ponorogo : Trimurti, 1992).
- CNN Indonesia, "Haris Azhar Sebut ada 5 Jenis Dugaan Netralitas ASN pada Pemilu 2019," <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190508202028-32-393192/haris-azhar-sebut-ada-5-jenis-dugaan-pelang-garan-pemilu-2019>, diakses pada 12 Juni 2019, pukul 13.00 WIB
- Detik.com, "Makin Sore, Aksi Kawal MK Meluber hingga Kemenko- polhukam," <https://news.detik.com/berita/d-4601030/makin-sore-massa-aksi-kawal-mk-meluber-hingga-kemenko-polhukam>, diakses pada 28 Juni 2019, pukul 19.45 WIB
- Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- Ibnu Khaldun, *Kitab al-Ibarwa Daiwaal- Muftada wa al-Akhbar* (Beirut: Dar- el-Kutub al-Ilmiyah, tth), jilid 3.
- Ibnu Taimiyah, *as-Siyasah asy-Syar'iyah*, Shahih al-Bukhori (59)
- iNews.id, "Bawa Bukti TIM IT BPN Laporkan Kesalahan Situng KPU di 73.715 TPS," <https://www.inews.id/news/nasional/bawa-bukti-tim-it-bpn-laporkan-kesalahan-situng-kpu-di-73-715-tps>, Diakses pada 18 Juni 2019, pukul 05.27 WIB
- Jurnal Pemikiran dan Peradaban Islam, ISLAMIA, Vol. V, No. 2, 2009. KBBI, "Politik," <https://kbbi.web.id/politik>, diakses tgl 19 Juni 2019, pukul 08.10 WIB
- Kompas.com, "Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas Karena Peluru Tajam," <https://nasional.kompas.com/read/2019/06/17/15533041/polri-4-dari-9-korban-kerusuhan-21-22-mei-2019-dipastikan-tewas-karena>, diakses pada 18

Juni 2019 pukul 05.33 WIB

Kompas.tv, “Sosok 3 Mantan Jenderal TNI dan Polri yang Jadi Tersangka Kerusuhan 21-22 Mei,”

<https://www.kompas.tv/article/48702/sosok-3-mantan-jenderal-tni-dan-polri-yang-jadi-tersangka-kerusuhan-21-22-mei>, Diakses pada 18 Juni 2019, pukul 05.40 WIB

Merdeka.com, “Poin-Poin Penting Putusan MK dalam Sidang Sengketa Pilpres 2019,” <https://www.merdeka.com/politik/catatan-catatan-penting-hakim-mk-dalam-persidangan-sengketa-pilpres.html>, diakses pada 28/06/2019, pukul 18.45 WIB

Saeful Anwar, *Filsafat Ilmu al-Ghazali Dimensi Ontologi dan Aksiologi* (Bandung: Pustaka Setia, 2007).

seputarpengetahuan.co.id, “Pengertian Politik Menurut Para Ahli,”

<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/06/pengertian-politik-menurut-para-ahli-terlengkap.html>, diakses 19 Juni 2019, pukul 07.45 WIB

Syahrul Kiram, “Kebangkitan Politik Indonesia,” esai, <https://news.detik.com/kolom/d-3692440/kebangkitan-politik-indonesia>, diakses 13 Juni 2019, pukul 09.00 WIB.